

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana terdiri dari beberapa daerah yang secara teritorial terpencar-pencar. Pemencaran secara kewilayahan berdampak pada pemencaran kekuasaan. Pola pemencaran tersebut dilakukan dengan otonomi luas yang mana desentralisasi sebagai pilihan utama, desentralisasi ini sebagai gambaran pemencaran ideal yang diharapkan peran serta daerah untuk mengelola dan mengurus urusan sendiri secara mandiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan pembagian pemerintahan yang mana diatur dalam konstitusi dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi dikalangan akademis, hal ini dikarenakan pembentukan UU tersebut menggunakan metode *omnibus law*. *Omnibus law* merupakan hal baru dalam teknik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Teknik atau metode ini tidak diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 176 UU Cipta Kerja mengatur tentang perubahan dan penambahan pasal yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode pendekatan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian deskriptif analisis. Sumber data sekunder, meliputi: peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum Pasal 176 UU Cipta Kerja dan Prospek terhadap hubungan pusat dan daerah tentunya mendasarkan pada tujuan awal terbentuknya UU Cipta Kerja. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Corak produk hukum yang terdapat dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja menurut Nonet dan Selznick, hemat peneliti masuk dalam kategori hukum otonom. Walaupun tidak termasuk dalam kategori hukum reponsif yang diidealkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick, akan tetapi ada suatu perkembangan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hubungan pusat dan daerah pasca terbentuknya UU Cipta kerja mengalami perubahan kewenangan dan pembagian urusan berimplikasi pada perubahan pembagian keuangan daerah. Perubahan keuangan akan mengikuti peralihan kewenangan dan penambahan urusan. Benturan kepentingan pusat dan daerah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cenderung sentralistik sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

SUMARRY

Indonesia is a unitary state which consists of several regions which are territorially scattered. Regional distribution has an impact on the distribution of power. The pattern of distribution is carried out with broad autonomy, in which decentralization is the main choice, this decentralization is a description of the ideal distribution that is expected to be the participation of the regions to manage and manage their own affairs independently. The Unitary State of the Republic of Indonesia is known as the division of government which is regulated in the constitution in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has caused controversy among academics, this is because the formation of the Law uses the omnibus law method. Omnibus law is a new thing in the technique of forming legislation in Indonesia. This technique or method is not accommodated in Law Number 12 of 2011

The results of the study show that the Political Law of Article 176 of the Job Creation Law and the prospects for the relationship between the center and the regions must be based on the initial purpose of the establishment of the Job Creation Act. Job creation carried out through arrangements related to improving the investment ecosystem and business activities shall at least contain regulations regarding: simplification of business permits, investment requirements, ease of doing business, research and innovation, land acquisition, and economic zones.

According to Nonet and Selznick, the types of legal products contained in Article 176 of the Job Creation Law are in the category of autonomous law. Although it is not included in the category of idealized responsive law as stated by Nonet and Selznick, there is a legal development in the formation of legislation.

The relationship between the center and the regions after the creation of the Job Creation Law underwent a change in authority and the division of affairs had implications for changes in the distribution of regional finances. Financial changes will follow the transfer of authority and additional affairs. The conflict of interest between the center and the regions contained in the Job Creation Law regarding the administration of regional government which tends to be centralized as stipulated in the Job Creation Law, has the potential to cause conflict or dispute between the Central and Regional Governments.